



## RINGKASAN

TANIA DWI OKTAVIA. Penerapan Kebijakan Relaksasi Pajak Terhadap Pajak Daerah di Tengah Pandemi *Covid-19* pada Bapenda Kota Bogor. *Implementation of the Tax Relaxation Policy on Regional Taxes in Midst of the Covid-19 Pandemic at Bogor Regional Income Agency*. Dibimbing oleh MELA NURDIALY.

Pandemi *covid-19* di Indonesia memberikan dampak yang cukup besar dan luas bagi masyarakat, baik di bidang kesehatan maupun ekonomi. Hal ini mengakibatkan pengangguran di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sehingga berdampak juga terhadap sektor pajak. Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan yang besar untuk negara baik pusat maupun daerah. Namun karena kondisi pandemi *covid-19* menyebabkan penerimaan pajak menurun, salah satunya pajak daerah Kota Bogor. Untuk menanggulangi dampak tersebut pemerintah Kota Bogor membuat kebijakan yaitu adanya relaksasi pajak berupa penundaan jatuh tempo pembayaran, penghapusan sanksi administrasi, dan pemberian pengurangan berupa diskon pembayaran yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Bogor sebagai dampak status kejadian luar biasa *covid-19* di Kota Bogor.

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah menguraikan kebijakan relaksasi pajak, menguraikan penerapan kebijakan relaksasi pajak, menguraikan dampak dari kebijakan relaksasi pajak, menguraikan penerimaan pajak daerah pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, menguraikan penerimaan pajak daerah tahun 2020, menguraikan kontribusi pajak daerah pada tahun 2018 sampai tahun 2020, menguraikan kendala dan upaya yang dilakukan oleh Bapenda Kota Bogor dalam menerapkan kebijakan relaksasi pajak.

Kebijakan relaksasi pajak pada Bapenda Kota Bogor yaitu berupa penundaan jatuh tempo pembayaran, penghapusan sanksi administrasi, dan pemberian diskon pembayaran. Adanya kebijakan relaksasi pajak diapresiasi dan memberikan dampak yang positif karena meringankan beban, mendorong dan memotivasi wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan. Penerimaan pajak daerah pada tahun 2018 sampai 2020 melebihi target meskipun di tahun 2020 terjadi penyesuaian target dan bergerak naik-turun. Kontribusi pajak daerah pada tahun 2018 sampai tahun 2020 terhadap PAD dapat dikategorikan sangat efektif. Adapun kendala yang dihadapi oleh Bapenda Kota Bogor dalam menjalankan kebijakan relaksasi pajak yaitu kurang optimalnya dalam melakukan sosialisasi dikarenakan adanya pemberlakuan PSBB, namun Bapenda Kota Bogor berupaya untuk giat menyebarkan informasi kepada masyarakat agar mengetahui kebijakan tersebut dengan cara memasang iklan melalui radio, koran, media sosial, dan pemasangan reklame.

Kata kunci: Pajak Daerah, Kebijakan Relaksasi Pajak, Bapenda Kota Bogor